

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah yang disertai pemalsuan dokumen serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah sebagai korban pembangunan ilegal. Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya mekanisme pidana dan perdata dalam praktik penyelesaian sengketa, sehingga meskipun pelaku dapat dipidana, pemulihan hak korban sering kali tetap memerlukan proses gugatan perdata yang terpisah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghukuman dan pemulihan hak dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma dan efektivitas penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun efektivitasnya masih terkendala dualisme jalur penyelesaian dan lemahnya eksekusi putusan.

Penelitian ini menawarkan model integrasi penegakan hukum yang menekankan sinkronisasi antara mekanisme pidana dan perdata, sehingga proses penghukuman pelaku dapat berjalan seiring dengan pemulihan hak korban. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian dan keadilan secara nyata.

Kata Kunci: penyerobotan tanah, pemalsuan dokumen, perlindungan hukum, dualisme pidana dan perdata, integrasi penegakan hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of law enforcement against land grabbing involving document forgery and examines the legal protection available to landowners as victims of illegal construction. The core issue lies in the lack of integration between criminal and civil mechanisms in resolving land disputes. Although perpetrators may be criminally sanctioned, the restoration of ownership rights often requires a separate civil lawsuit. This situation reflects a structural gap between punishment and the recovery of victims' rights within Indonesia's land law system.

This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to assess normative consistency and practical effectiveness. The findings reveal that legal protection is normatively regulated under Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and relevant criminal provisions of the Indonesian Penal Code. Nevertheless, its effectiveness remains limited due to the dualism of legal remedies and weaknesses in enforcement.

This study proposes an integrated law enforcement model that synchronizes criminal and civil processes, enabling punishment and restoration of rights to function cohesively. Such integration is expected to strengthen legal certainty, justice, and substantive protection of land rights.

Keywords: *land grabbing, document forgery, legal protection, criminal and civil dualism, integrated law enforcement.*